



Dinamika Implementasi Kebijakan Penertiban dan Pembinaan Masalah Sosial di Kota Jambi (Sebuah Studi Pemetaan)

Chessi Adeliya Simatupang^{1*}, Dinda Syufradian Putra², Azira Novia Rizal³

¹⁻³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: chessiadeliya@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the complex problems of street children, vagrants, and beggars in Jambi City, which are influenced by poverty, urbanization, and weak social protection. This phenomenon not only impacts public order but also reflects the suboptimal social welfare system at the regional level. Although local governments have implemented various policies through social order and rehabilitation approaches, their effectiveness still faces various structural and cultural challenges. This study uses Bryson's Policy Implementation Mapping theoretical framework, which includes indicators of interests, resources, channels, potential participation, level of influence, implications, and actions as the main analysis. The research approach used is a qualitative case study design to understand the dynamics of policy implementation in depth. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participant observation, and documentation, with informants selected using purposive sampling until data saturation was achieved. The results show that policy implementation mapping has been carried out through collaboration between the Social Service and the Public Order Agency (Satpol PP) with a structured preventive, repressive, and rehabilitative approach. However, implementation has not been optimal due to limited rehabilitation facilities, lack of coordination between agencies, low community participation, and high mobility of beggars from outside the region. Furthermore, there is a gap between high administrative achievements and the reality on the ground, which still shows a high rate of returning to the streets. This study concludes that mapping policy implementation requires a more holistic, sustainable approach based on economic empowerment and strengthened cross-sectoral coordination to address this social issue more effectively and effectively.*

Keywords: *Beggars; Policy Implementation; Social Rehabilitation; Street Children; Vagrants.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kompleksnya permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi yang dipengaruhi oleh kemiskinan, urbanisasi, serta lemahnya perlindungan sosial. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya sistem kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Meskipun pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan melalui pendekatan penertiban dan rehabilitasi sosial, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *Policy Implementation Mapping* dari Bryson yang mencakup indikator kepentingan, sumber daya, channel, kemungkinan partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi, dan *action* sebagai analisis utama. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami dinamika implementasi kebijakan secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive sampling hingga mencapai kejenuhan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan implementasi kebijakan telah dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP dengan pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif yang terstruktur. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta tingginya mobilitas gepeng dari luar daerah. Selain itu, terdapat kesenjangan antara capaian administratif yang tinggi dengan realitas lapangan yang masih menunjukkan tingginya tingkat kembali ke jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemetaan implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang lebih holistik, berkelanjutan, serta berbasis pemberdayaan ekonomi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan masalah sosial ini lebih efektif dan tepat sasaran.

Kata kunci: Anak Jalanan; Gelandangan; Implementasi Kebijakan; Pengemis; Rehabilitasi Sosial.

1. LATAR BELAKANG

Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (gepeng) merupakan tiga fenomena sosial yang terus berkembang di Indonesia, khususnya di pusat-pusat perkotaan. Urbanisasi yang pesat, kemiskinan struktural, dan lemahnya fungsi keluarga menjadi faktor utama yang

mendorong individu untuk mencari penghidupan di ruang publik. Perilaku mereka tidak hanya mencerminkan kerawanan sosial yang lebih luas, tetapi juga berimplikasi pada munculnya permasalahan ketertiban di kota (Hermawanto et al., 2025). Fenomena ini semakin kompleks karena melibatkan gabungan faktor ekonomi, putus sekolah, dan mobilitas penduduk dari luar daerah yang mendorong kelompok rentan memasuki ruang publik demi kelangsungan hidup (Djarmiko et al., 2023).

Di Kota Jambi, keberadaan gepeng terlihat nyata di tempat-tempat umum seperti pasar, lampu merah, terminal, dan pusat perbelanjaan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Jambi, jumlah gelandangan melonjak dari 15 jiwa pada tahun 2019 menjadi 356 jiwa pada tahun 2024, sementara pengemis berfluktuasi dari 51 jiwa pada tahun 2019 hingga puncaknya 221 jiwa pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 139 jiwa pada 2025. Data ini menunjukkan bahwa permasalahan gepeng bersifat dinamis dan belum menunjukkan kecenderungan penurunan yang stabil (Meifindo & Effendy, 2025). Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Dinas Sosial dalam memberikan layanan preventif, represif, dan rehabilitatif secara menyeluruh (Alatas, 2024).

Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis sebagai landasan hukum pelaksanaan program. Dinas Sosial bersama Satpol PP membentuk Tim Terpadu (Timdu) yang melakukan patroli dan penjangkauan rutin mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB di titik-titik rawan seperti Simpang Rimbo, Pasar Angso Duo, dan kawasan Tugu Keris Siginjai (Meifindo & Effendy, 2025). Meskipun anggaran program rehabilitasi sosial meningkat signifikan dari Rp1,29 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp2,93 miliar pada tahun 2026 (Dinas Sosial, 2026), efektivitas program belum mampu mengatasi permasalahan kelompok rentan tersebut secara memadai (Melli, 2024).

Terdapat sejumlah hambatan struktural yang memengaruhi situasi ini. Fasilitas rehabilitasi dan rumah singgah yang tidak memadai menyebabkan anak-anak berkeliaran kembali (Warwuru et al., 2023). Adapun koordinasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP belum sempurna sehingga menghasilkan strategi yang kurang ideal (Hikmal et al., 2024; Meifindo & Effendy, 2025). Banyak program pemberdayaan ekonomi masih sangat terbatas (Wahyudi et al., 2021). Diketahui juga jika masyarakat seringkali memberikan dukungan finansial langsung kepada gepeng yang justru memperkuat ketergantungan (Alatas, 2024). Lebih dari 70 persen anak punk yang ada berasal dari luar daerah pada tahun 2023, sehingga penanganannya memerlukan strategi lintas wilayah yang komprehensif (Jambikota.go.id, 2025).

Penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi kebijakan penanganan gepeng di Kota Jambi antara lain dilakukan oleh (Hasanah, 2020; Kurniawan & Heryani, 2021) yang fokus pada implementasi Perwali 29 Tahun 2016, serta (Meifindo & Effendy, 2025) tentang kolaborasi Dinas Sosial dan Satpol PP. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan sesuai regulasi, namun terkendala fasilitas dan koordinasi. Oktaviola dan Anderson (2022), mengkaji pembinaan moral melalui empat tahap di Dinas Sosial, sementara Rachmawati et al. (2021) dan Maryatun et al. (2022) menggunakan model Edward III dan menemukan komunikasi tidak efektif, sumber terbatas, serta pendekatan top-down yang lemah dalam perubahan perilaku. Penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada program Dinas Sosial dan kendala administratif tanpa menganalisis secara komprehensif pemetaan implementasi melalui tujuh indikator yang mencakup kepentingan, sumber daya, saluran, partisipasi, tingkat pengaruh, implikasi, dan tindakan.

Novelty penelitian ini terletak pada penggunaan kerangka teori *Policy Implementation Mapping* menurut Bryson (2004) dengan tujuh indikator komprehensif, yang mengintegrasikan faktor kontekstual Kota Jambi seperti PMKS lintas wilayah (lebih dari 70% dari luar kota) dan norma perkotaan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji efektivitas jangka panjang rehabilitasi melalui persepsi pelaksana dan penerima manfaat, serta mengidentifikasi hambatan struktural untuk menghasilkan rekomendasi holistik berbasis bukti. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan memetakan secara sistematis *policy implementation mapping* melalui tujuh indikator dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi.

2. KAJIAN TEORITIS

***Policy Implementation Mapping* menurut Bryson**

Policy Implementation Mapping merupakan pendekatan analitis yang dikembangkan oleh John M. Bryson (2004) untuk memahami proses implementasi kebijakan melalui identifikasi sistematis terhadap pemangku kepentingan, kepentingan yang mereka bawa, sumber daya yang dimiliki, jalur interaksi yang digunakan, tingkat partisipasi yang mungkin terjadi, serta tingkat pengaruh yang dimiliki dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa implementasi kebijakan berlangsung dalam konteks *shared power world*, di mana tidak ada satu aktor pun yang memiliki kewenangan absolut dalam menentukan keberhasilan kebijakan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana hubungan antar pemangku kepentingan dikelola, sejauh mana

kepentingan mereka terakomodasi, serta bagaimana dukungan dan oposisi dimobilisasi selama proses implementasi berlangsung.

Bryson (2004) merumuskan tujuh indikator utama dalam *Policy Implementation Mapping*. Pertama, kepentingan (*interests*), yaitu tujuan, harapan, dan manfaat yang diharapkan oleh para aktor yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan. Kedua, sumber daya (*resources*), yaitu aset dan kemampuan stakeholder yang dapat digunakan untuk mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan, mencakup finansial, jaringan sosial, kewenangan hukum, dan legitimasi politik. Ketiga, *channel* (saluran implementasi), yaitu mekanisme dan jalur yang digunakan untuk menyalurkan kepentingan, yang dapat bersifat formal seperti regulasi dan forum koordinasi, maupun informal seperti lobi dan tekanan opini publik. Keempat, kemungkinan partisipasi (*probability of participation*), yaitu tingkat kecenderungan stakeholder untuk terlibat aktif dalam implementasi kebijakan. Kelima, tingkat pengaruh (*level of influence*), yaitu kemampuan stakeholder untuk memengaruhi jalan dan hasil implementasi kebijakan. Keenam, implikasi (*implications*), yaitu proses dinamis dan politis yang dilalui berbagai stakeholder untuk membawa kebijakan dari keputusan formal ke kehidupan nyata. Ketujuh, *action* (rencana tindakan), yaitu langkah-langkah operasional konkret yang diperlukan untuk mendorong stakeholder mendukung pelaksanaan kebijakan.

Tabel 1 berikut ini merangkum kajian pustaka yang menjadi dasar penelitian ini, menampilkan penelitian terdahulu yang relevan beserta hasilnya.

Tabel 1. Kajian Pustaka.

No	Pengelompokan (Sudut Pandang)	Hasil
1.	Implementasi Kebijakan Perwali 29 Tahun 2016	(Hasanah, 2020; Kurniawan & Heryani, 2021). Monitoring lapangan, rehabilitasi, pendataan, pemulangan PMKS sudah berjalan sesuai regulasi, namun terkendala fasilitas rumah singgah, koordinasi kelurahan, dan partisipasi masyarakat.
2.	Kolaborasi Antar Lembaga	(Meifindo & Effendy, 2025). Kolaborasi Dinas Sosial-Satpol PP efektif dalam penertiban PMKS sesuai Perwali 29/2016, namun terkendala reintegrasi lintas wilayah dan minim pelatihan vokasi.
3.	Pembinaan & Rehabilitasi	(Oktaviola et al., 2022). Pembinaan moral di Dinas Sosial Kota Jambi melalui 4 tahap: pendataan, pengarahan, bimbingan mental/spiritual dan disiplin hidup. Efektif tapi anak sering kembali ke jalanan.
4.	Kolaborasi Lintas Sektor	(Fadilla et al., 2023). Dinas Sosial & Satpol PP bekerja sama dalam penanganan gepeng; hasil belum signifikan karena keterbatasan fasilitas dan SDM. Rekomendasi: metode bimbingan lebih efektif, tambahan rumah singgah, perluasan kolaborasi dengan swasta.
5.	Implementasi Kebijakan (Model Edward III)	(Maryatun et al., 2022; Rachmawati & Faedlulloh, 2021). Menggunakan model Edward III (komunikasi, <i>resources</i> , <i>disposition</i> , <i>structure</i>). Komunikasi tidak efektif, <i>resources</i> terbatas, <i>disposition</i> suboptimal, serta <i>top-down approach</i> lemah dalam perubahan perilaku.

Sumber: Peneliti, 2026.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang berfokus pada *Policy Implementation Mapping* penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menganalisis proses implementasi kebijakan, persepsi pemangku kepentingan, dan hambatan kontekstual di Kota Jambi secara mendalam, sementara desain studi kasus memungkinkan pemahaman komprehensif tentang interaksi antar aktor dalam situasi dunia nyata. Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yakni Januari 2026 hingga April 2026, bertempat di Kota Jambi dengan fokus pada area publik dan lokasi operasional Tim Terpadu Dinas Sosial dan Satpol PP.

Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung para aktor terhadap pemetaan implementasi kebijakan. Informan utama yang dilibatkan meliputi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Jambi (Bapak Rahman Muklis, S.STP) sebagai pelaksana kebijakan, Ketua DPRD Dapil IV Kota Jambi (Ibu Maria Magdalena, S.S.) sebagai aktor legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, akademisi Universitas Jambi (Bapak Galank Pratama, S.I.P., M.Si.) sebagai pemberi perspektif teoritis, serta kelompok sasaran kebijakan yaitu anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang telah menjalani proses rehabilitasi sosial. Jumlah informan kunci sebanyak sembilan orang, dengan pengambilan sampel dilanjutkan hingga tercapai kejenuhan data (*data saturation*) sesuai prinsip metode kualitatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber komprehensif untuk memastikan validitas dan kedalaman analisis pemetaan implementasi kebijakan, (1) Wawancara mendalam semi-struktural dilakukan berdasarkan tujuh indikator pemetaan; (2) Observasi partisipatif dilakukan melalui patroli oleh Tim Terpadu dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB, dilanjutkan konsinyir hingga pukul 22.00 WIB di lokasi rawan seperti Simpang Mayang, Simpang Rimbo, Pasar Angso Duo, dan Tugu Keris Siginjai; (3) Analisis dokumen mencakup Perwali No. 29 Tahun 2016, Renstra Dinas Sosial 2024–2026, data kuantitatif tren fluktuatif PMKS tahun 2019–2025, laporan kegiatan penjangkauan, serta data operasional penertiban dan pembinaan. Analisis data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan perbandingan hasil observasi partisipatif dengan temuan wawancara mendalam serta dokumen resmi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Jambi merupakan ibu kota Provinsi Jambi, terletak di bagian timur tengah Pulau Sumatera pada lintang selatan 1°30'2,98" sampai 1°40'1,07" dan bujur timur 103°40'1,67" sampai 103°40'0,22", dengan ketinggian rata-rata 10–60 meter di atas permukaan laut (Badan Pusat Statistik Kota Jambi, 2022). Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa, Kota Jambi terus mengalami peningkatan jumlah penduduk serta kegiatan ekonomi seiring urbanisasi yang tinggi. Perkembangan kota yang cepat tidak selalu diiringi penyebaran kesejahteraan yang merata, sehingga memunculkan kelompok rentan seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang menggunakan ruang publik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Fenomena gepeng di Kota Jambi dapat ditemukan di berbagai lokasi strategis dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kelompok tersebut umumnya melakukan aktivitas di ruang publik seperti kawasan Simpang Rimbo (persimpangan mengarah ke Mendalo), Pasar Angso Duo (Jalan KH Ahmad Dahlan menuju Jembatan Makalam), dan kawasan Tugu Keris Siginjai di Jalan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru. Ketiga titik ini memiliki kepadatan lalu lintas yang tinggi sehingga memberikan peluang bagi aktivitas informal di jalan, seperti mengamen, mengemis, atau berjualan tisu. Tabel 2 berikut menyajikan logbook penelitian yang merangkum tahapan pengumpulan data yang dilakukan di lapangan.

Tabel 2. Logbook Penelitian.

No	Tanggal	Sumber Data	Keterangan Kegiatan Penelitian
1.	20/1/2026	Dinas Sosial Kota Jambi	Pengajuan surat izin penelitian ke Dinas Sosial Kota Jambi; diterima langsung oleh petugas Dinas Sosial Kota Jambi.
2.	26/1/2026	Gelandangan	Wawancara dengan gelandangan (Bapak Indar Soeharto): kebijakan penanganan masih lebih menekankan penertiban dibandingkan pemberdayaan sosial dan ekonomi; diperlukan program pembinaan dan bantuan usaha yang berkelanjutan.
3.	26/1/2026	Pengemis	Wawancara dengan pengemis/manusia silver (Bapak Ridwan): kebijakan lebih berorientasi pada penertiban dibandingkan pemberdayaan. Mengemis adalah satu-satunya cara memperoleh penghasilan cepat untuk kebutuhan sehari-hari.
4.	27/1/2026	Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial	Wawancara dengan Bapak Rahman Muklis, S.STP: implementasi kebijakan telah berjalan terencana dan terstruktur, namun belum sepenuhnya efektif. Keterbatasan sumber daya, kendala administratif, dan faktor perilaku penerima manfaat menjadi tantangan utama.
5.	26/1/2026	Anak Jalanan	Wawancara dengan anak jalanan (Restu): kebijakan belum optimal, masih didominasi penertiban tanpa solusi berkelanjutan. Keterbatasan akses bantuan, pekerjaan, dan pendidikan menyebabkan kembali ke jalan.
6.	18/02/2026	DPRD Kota Jambi	Pengajuan surat izin penelitian ke DPRD Kota Jambi; diterima langsung.
7.	09/3/2026	Akademisi	Wawancara dengan Bapak Galank Pratama, S.I.P., M.Si. (Universitas Jambi): implementasi didominasi pendekatan regresif (razia dan pemulangan); keterbatasan anggaran

8. 07/04/2026 DPRD Kota Jambi mendorong preferensi intervensi murah daripada pemberdayaan ekonomi. Wawancara dengan Ketua DPRD Dapil IV (Ibu Maria Magdalena, S.S.): DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan representasi aspirasi masyarakat; diperlukan sinergi antar aktor dan evaluasi kebijakan berkelanjutan.

Sumber: Data Primer, 2026.

***Policy Implementation Mapping* Penanganan Gepeng di Kota Jambi**

Permasalahan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi ditangani melalui berbagai upaya yang melibatkan Dinas Sosial dan Satpol PP. Secara normatif, kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis. Penelitian ini menggunakan teori *Policy Implementation Mapping* Bryson (2004) dengan tujuh indikator untuk menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan tersebut secara komprehensif. Hasil penelitian dirangkum dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pemetaan *Policy Implementation Mapping* Penanganan Gepeng di Kota Jambi.

Indikator	Temuan	Kendala / Catatan
Kepentingan	Tinggi pada aktor formal (Dinas Sosial, DPRD); selaras dengan tujuan ketertiban sosial dan peningkatan kesejahteraan.	Ketidaksesuaian kepentingan: kelompok sasaran lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi harian.
Sumber Daya	Dinas Sosial memiliki aparatur, program layanan, dan dasar kebijakan yang cukup memadai; anggaran meningkat 2022–2026.	Anggaran khusus belum tersedia memadai; program pemberdayaan produktif terbatas; dominasi bantuan konsumtif.
<i>Channel</i>	Komunikasi lintas instansi formal cukup terstruktur (SOP, RKA, evaluasi program, koordinasi Satpol PP).	Komunikasi dengan kelompok sasaran masih satu arah; tidak ada ruang dialog; sosialisasi program minim.
Kemungkinan Partisipasi	Mekanisme formal tersedia: musrenbang, pelaporan masyarakat, Tim Aksi Cepat.	Partisipasi kelompok sasaran bersifat pasif; lebih berperan sebagai penerima manfaat, bukan subjek perencanaan.
Tingkat Pengaruh	DPRD dominan dalam persetujuan kebijakan dan penganggaran; Dinas Sosial sebagai perencana teknis.	Kelompok sasaran memiliki pengaruh minimal; pola implementasi masih <i>top-down</i> dan hierarkis.
Implikasi	Sistem penanganan terstruktur terbentuk; akses layanan sosial bagi PMKS meningkat secara administratif.	Dampak jangka panjang belum optimal; tingginya angka <i>recidivism</i> (kembali ke jalan).
<i>Action</i>	Patroli rutin, penjangkauan, identifikasi, asesmen, pemberian layanan sosial (pendataan & pemulangan).	Program rehabilitasi dan pemberdayaan belum optimal; dominasi penertiban jangka pendek.

Sumber: Data Primer (Diolah), 2026.

Kepentingan

Indikator kepentingan dalam *Policy Implementation Mapping* digunakan untuk mengidentifikasi tujuan, motivasi, serta manfaat yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan. Dalam konteks penelitian ini, terdapat dua pola kepentingan yang saling berbeda. Dari sisi pemerintah, kebijakan penanganan gepeng memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dalam agenda pemerintahan daerah karena berkaitan dengan ketertiban umum serta peningkatan kesejahteraan sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi, Bapak

Rahman Muklis, S.STP, menyatakan: “Tujuan kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi menunjukkan kesesuaian dengan kepentingan masyarakat, karena kebijakan tersebut secara langsung merespon permasalahan sosial yang dirasakan publik, terutama keberadaan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di ruang-ruang publik seperti persimpangan lampu merah” (wawancara, 27 Januari 2026). Kebijakan ini juga diposisikan oleh DPRD sebagai barometer keberhasilan kinerja legislatif, merujuk pada amanat UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2014.

Anggota DPRD Dapil IV Kota Jambi, Ibu Maria Magdalena, S.S., menegaskan: “Tentu ini sangat penting bagi kami, karena barometer kami sebagai DPRD pelaksana pemerintah sesuai dengan UU No 23 tahun 2014. Pembangunan kesejahteraan, pembangunan fisik dan lainnya dilakukan pemerintah dan DPRD. Artinya ini sangat penting sesuai dengan UUD 1945, kepentingan negara diikuti dengan kepentingan rakyat yang dipelihara oleh negara” (wawancara, 07 April 2026). Hal ini mengindikasikan adanya orientasi kelembagaan yang kuat terhadap isu kesejahteraan sosial sebagai prioritas dalam agenda kebijakan. Penelitian terdahulu tentang implementasi Perwali Nomor 29 Tahun 2016 juga menunjukkan bahwa kebijakan penanganan gepeng telah diarahkan untuk menciptakan ketertiban sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hasanah, 2020; Kurniawan & Heryani, 2021).

Namun, pada kelompok sasaran, ditemukan ketidaksesuaian kepentingan yang signifikan. Informan manusia silver, Bapak Ridwan, menyatakan: “Karena ini satu-satunya cara saya dapat uang cepat untuk kebutuhan sehari-hari. Saya tidak punya pekerjaan tetap, jadi walaupun ada larangan, tetap saya jalani karena kebutuhan keluarga” (wawancara, 27 Januari 2026). Sementara itu, anak jalanan bernama Restu mengungkapkan: “Belum sepenuhnya sesuai. Soalnya kami memang ditertibkan, tapi setelah itu belum ada bantuan yang benar-benar membantu kami untuk berhenti dari jalan” (wawancara, 26 Januari 2026). Kondisi ini menggambarkan bahwa kepentingan kelompok sasaran lebih bersifat subsisten dan ekonomi jangka pendek, sedangkan kebijakan lebih berorientasi pada ketertiban sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian Maryatun et al. (2022) dan Rachmawati et al. (2021) yang menemukan bahwa pendekatan top-down menyebabkan rendahnya perubahan perilaku kelompok sasaran.

Sumber Daya

Indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan digunakan untuk menilai tingkat kesiapan dan kapasitas pelaksana kebijakan. Dari sisi finansial, Dinas Sosial Kota Jambi menghadapi keterbatasan alokasi anggaran yang bersifat khusus untuk penanganan gepeng. Bapak Rahman Muklis menjelaskan: “Dinas Sosial Kota Jambi tidak memiliki anggaran besar yang dialokasikan secara khusus dan rutin hanya untuk penanganan Anjal Gepeng. Kondisi ini

diperberat dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, sehingga Dinas Sosial dituntut untuk tetap memberikan pelayanan maksimal dalam keterbatasan sumber daya keuangan yang tersedia” (wawancara, 27 Januari 2026). Meskipun demikian, secara keseluruhan anggaran program rehabilitasi sosial terus meningkat dari Rp1,29 miliar (2022) menjadi Rp2,93 miliar (2026), mencerminkan komitmen pemerintah daerah (Dinas Sosial Kota Jambi, 2026).

Dari perspektif DPRD, dukungan anggaran bersifat kondisional dan dinamis sesuai urgensi permasalahan. Ibu Maria Magdalena menyatakan: “Tentunya kami sebagai anggota DPRD lebih mementingkan kepentingan rakyat dari pada kepentingan yang lainnya... intinya itu tergantung urjennya apa” (wawancara, 07 April 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa alokasi sumber daya sangat bergantung pada proses politik anggaran yang melibatkan penilaian prioritas. Akademisi Universitas Jambi, Bapak Galank Pratama, S.I.P., M.Si., menambahkan: “Implementasi kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi masih didominasi oleh pendekatan jangka pendek, seperti razia dan pemulangan sementara ke daerah asal. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan anggaran yang dimiliki, sehingga pemerintah cenderung memilih intervensi yang lebih murah dan cepat” (wawancara, 09 Maret 2026). Keterbatasan ini berdampak pada dominasi intervensi jangka pendek dan minimnya program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan temuan Maryatun et al. (2022) tentang keterbatasan fasilitas dan SDM.

Dari perspektif kelompok sasaran, bantuan yang diterima dinilai bermanfaat namun belum mencukupi kebutuhan secara menyeluruh. Pengemis Ibu Asminah menyatakan: “Alhamdulillah dek saya sangat bersyukur sekali, bantuan ini sangat membantu bagi saya walaupun belum cukup untuk semua kebutuhan saya” (wawancara, 31 Januari 2026). Bapak Indar Soeharto mengharapkan adanya bantuan modal usaha: “Iya, kalau ada yang mau berdagang bisa diberi modal. Tapi harus jelas perjanjiannya, misalnya dikembalikan secara bertahap supaya ada tanggung jawab” (wawancara, 26 Januari 2026). Temuan ini menegaskan bahwa sumber daya yang tersedia belum berorientasi pada pemberdayaan produktif, sehingga kelompok sasaran tetap dalam siklus ketergantungan.

Channel (Saluran Implementasi)

Indikator channel digunakan untuk menganalisis mekanisme dan jalur komunikasi yang digunakan dalam proses implementasi kebijakan. Dinas Sosial Kota Jambi telah menerapkan saluran komunikasi yang terstruktur melalui berbagai jalur formal. Bapak Rahman Muklis menjelaskan: “Jalur komunikasi formal dalam pelaksanaan kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dinilai cukup efektif karena didukung oleh standar pelayanan, SOP yang jelas, serta koordinasi lintas lembaga yang terstruktur. Setiap kegiatan

penanganan dan penganggaran dikomunikasikan melalui forum resmi, seperti rapat penyusunan RKA dan evaluasi program, sehingga kebijakan yang dilaksanakan tetap berada dalam koridor regulasi dan mendapat legitimasi kelembagaan” (wawancara, 27 Januari 2026). DPRD juga berperan sebagai mitra pembangunan yang terus berkoordinasi secara dinamis menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat (wawancara Ibu Maria Magdalena, 07 April 2026).

Namun, saluran komunikasi kebijakan kepada kelompok sasaran masih jauh dari optimal. Bapak Indar Soeharto menyatakan: “Belum pernah. Saya tidak pernah diajak berdiskusi atau diberi penjelasan langsung tentang program pemerintah. Yang saya tahu hanya kalau ada penjaringan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, setelah itu tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai program atau pembinaan apa yang diberikan” (wawancara, 26 Januari 2026). Anak jalanan Restu juga mengungkapkan hal serupa: “Belum pernah. Saya nggak pernah diajak bicara atau dijelaskan soal program pemerintah. Biasanya cuma disuruh ikut waktu razia saja” (wawancara, 26 Januari 2026). Kondisi ini menunjukkan saluran komunikasi masih bersifat satu arah dan pasif, di mana masyarakat hanya menerima proses pendataan tanpa pemahaman yang memadai mengenai mekanisme lanjutan.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Rachmawati et al. (2021) yang menemukan bahwa implementasi kebijakan masih didominasi pola komunikasi *top-down*, sehingga interaksi antara pelaksana dan kelompok sasaran bersifat terbatas dan tidak partisipatif. Akademisi Bapak Galank Pratama juga menegaskan bahwa pola komunikasi antar aktor kebijakan masih terbatas pada mekanisme operasional regresif (wawancara, 09 Maret 2026). Dengan demikian, indikator channel dalam implementasi kebijakan mengindikasikan adanya kelemahan dalam efektivitas jalur komunikasi, baik dari segi keterbukaan, integrasi antar aktor, maupun keberlanjutan koordinasi dengan kelompok sasaran.

Kemungkinan Partisipasi

Indikator kemungkinan partisipasi digunakan untuk menilai sejauh mana aktor-aktor kebijakan memiliki ruang untuk terlibat secara aktif dalam proses implementasi. Secara normatif, pemerintah telah menyediakan berbagai mekanisme partisipasi masyarakat. Bapak Rahman Muklis menjelaskan bahwa Dinas Sosial membuka dan menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait kelompok Penerima Atensi Sosial (12 PAS), serta melibatkan masyarakat sebagai pengawas sosial dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan proses penyusunan kebijakan daerah (wawancara, 27 Januari 2026). DPRD juga menyalurkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme reses dan musrenbang yang menunjukkan adanya tingkat partisipasi publik yang cukup tinggi secara formal.

Namun dalam praktiknya, partisipasi kelompok sasaran masih sangat terbatas. Dari hasil observasi lapangan dan wawancara, kelompok sasaran lebih berperan sebagai penerima manfaat dibandingkan sebagai subjek yang terlibat dalam proses perencanaan maupun evaluasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan masih bersifat top-down. Hal ini sejalan dengan penelitian Maryatun et al. (2022) dan Rachmawati et al. (2021) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan masih mengalami kendala dalam penyampaian informasi dan lemahnya komunikasi kepada masyarakat sasaran, sehingga berdampak pada rendahnya perubahan perilaku kelompok sasaran. Dalam perspektif Bryson (2004), kondisi ini menunjukkan bahwa salah satu elemen penting dalam pemetaan implementasi kebijakan, yang mana itu adalah *stakeholder engagement*, belum terkelola secara optimal.

Berdasarkan triangulasi sumber, diperoleh konsistensi informasi dari berbagai informan bahwa partisipasi kelompok sasaran dalam proses kebijakan masih bersifat pasif dan terbatas. Dari perspektif Dinas Sosial, meskipun secara normatif telah tersedia mekanisme partisipasi masyarakat, namun dalam praktiknya keterlibatan tersebut masih bergantung pada relevansi program dan belum sepenuhnya bersifat substantif. Dengan demikian, kondisi ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme partisipatif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.

Tingkat Pengaruh

Indikator tingkat pengaruh digunakan untuk mengidentifikasi distribusi kekuasaan dan dominasi antar aktor dalam proses implementasi kebijakan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa distribusi pengaruh bersifat hierarkis dan didominasi oleh aktor formal pemerintahan. Bapak Rahman Muklis menjelaskan: “Pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan atensi sosial adalah DPRD Kota Jambi. Dinas Sosial berperan sebagai inisiator dan perencana program, namun seluruh kebijakan dan penganggaran harus mendapatkan persetujuan DPRD agar dapat dilaksanakan. Selain itu, masukan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang dan reses DPRD turut memengaruhi arah kebijakan” (wawancara, 27 Januari 2026). DPRD dengan kewenangan persetujuan formal menjadi aktor kunci yang menentukan dapat atau tidaknya suatu program dijalankan.

Ibu Maria Magdalena mempertegas posisi dominan DPRD: “Sangat besar karena kami wakil rakyat DPRD, untungnya kebijakan itu berdasarkan aspirasi rakyat yang harus kami perjuangkan sangat besar” (wawancara, 07 April 2026). Di sisi lain, pengaruh politik memiliki dampak signifikan terhadap prioritas anggaran. Bapak Galank Pratama menjelaskan: “Pengaruh politik sangat signifikan terhadap efektivitas kebijakan sosial di daerah. Hal ini tercermin dari proses penentuan prioritas anggaran dan kebijakan yang lebih mengutamakan

sektor yang dianggap produktif secara ekonomi dibandingkan sektor sosial seperti Dinas Sosial. Akibatnya, kebijakan penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis tidak menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, sehingga alokasi anggaran menjadi terbatas” (wawancara, 09 Maret 2026).

Sementara itu, kelompok sasaran memiliki pengaruh yang sangat rendah. Bapak Indar Soeharto menyatakan: “Kalau menurut saya, yang menentukan itu dari pihak pemerintah, terutama Dinas Sosial. Mereka yang punya kewenangan untuk mendata dan menentukan siapa yang dapat bantuan. Kami tidak punya pengaruh dalam hal itu” (wawancara, 26 Januari 2026). Kondisi ini menegaskan bahwa pola implementasi kebijakan masih cenderung top-down, sejalan dengan temuan Rachmawati et al. (2021) dan Meifindo & Effendy (2025) yang menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjadi lebih bersifat operasional dibandingkan struktural dalam pengambilan keputusan.

Implikasi

Indikator implikasi digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan diterjemahkan ke dalam praktik nyata serta dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaannya. Implementasi kebijakan penanganan gepeng di Kota Jambi telah menghasilkan sistem penanganan yang cukup terstruktur melalui proses penjangkauan, pendataan, asesmen, serta pemberian layanan sosial. Berdasarkan data Dinas Sosial, patroli bersama Kecamatan Jelutung pada tanggal 5 Maret 2026 berhasil menjaring 12 orang yang terdiri dari 3 pengemis (kemoceng), 3 manusia silver, 4 penjual tisu, 1 pengemis di bawah umur, dan 1 penjual mainan; 6 orang dipulangkan dan 6 orang lainnya diinapkan di rumah singgah. Secara administratif, program rehabilitasi sosial mencapai 100% dari target yang ditetapkan, dengan total penerima manfaat sebesar 1.500 orang per tahun (Dinas Sosial Kota Jambi, 2026).

Namun, dampak jangka panjang berupa pemberdayaan dan pengurangan ketergantungan kelompok sasaran terhadap aktivitas jalanan belum sepenuhnya tercapai. Tingginya angka *recidivism* (kembali ke jalan) menjadi indikasi bahwa pendekatan yang dominan represif belum mampu menyelesaikan akar permasalahan. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya koordinasi antarinstansi, sebagaimana yang ditemukan oleh Meifindo & Effendy (2025). Kebijakan yang bersifat jangka pendek dan reaktif, tanpa diikuti program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, menyebabkan kelompok sasaran tidak memiliki alternatif penghidupan yang memadai. Oktaviola, et al., (2022) juga menemukan bahwa meskipun pembinaan melalui empat tahap efektif secara formal, anak-anak seringkali kembali ke jalanan.

Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara capaian administratif dan realitas lapangan. Capaian 100% pelayanan belum sepenuhnya menggambarkan mutu layanan rehabilitasi.

Dalam pendekatan kualitatif, penting untuk melihat bagaimana persepsi para pelaksana dan penerima manfaat terhadap program ini, serta bagaimana keberlanjutan rehabilitasi pasca pelayanan (Dinas Sosial Kota Jambi, 2026). Dengan demikian, implikasi kebijakan penanganan gepeng di Kota Jambi memperlihatkan bahwa sistem penanganan telah terbangun secara struktural, namun belum mampu menghasilkan dampak perubahan sosial yang signifikan dan berkelanjutan bagi kelompok sasaran.

Action (Tindakan)

Indikator *action* digunakan untuk menganalisis langkah-langkah operasional konkret yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan. Tindakan nyata yang dilakukan oleh para aktor kebijakan dalam penanganan gepeng di Kota Jambi meliputi: (1) patroli dan penjangkauan rutin oleh Tim Terpadu (Dinas Sosial, Satpol PP, kelurahan, dan kecamatan) mulai pukul 08.00–17.00 WIB dan konsinyir hingga pukul 22.00 WIB; (2) pendataan dan identifikasi kondisi sosial penerima manfaat; (3) asesmen kebutuhan dan pemberian layanan sosial berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial; serta (4) *monitoring* dan evaluasi. Dalam konteks kegiatan penjangkauan, petugas turun langsung ke lapangan untuk menjangkau individu yang termasuk kategori anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, kemudian dilakukan proses identifikasi latar belakang sosial dan asesmen kebutuhan layanan.

Meskipun tindakan-tindakan tersebut telah dijalankan secara rutin, program rehabilitasi dan pemberdayaan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dominasi kegiatan penertiban, razia, pendataan, dan pemulangan menunjukkan bahwa *action* yang diambil masih lebih berorientasi pada penanganan gejala di permukaan dibandingkan penyelesaian akar permasalahan. Akademisi Bapak Galank Pratama menegaskan bahwa “tanpa adanya upaya [pemberdayaan] tersebut, kebijakan tidak akan mampu menyelesaikan akar masalah dan hanya menghasilkan pola penanganan yang berulang” (wawancara, 09 Maret 2026). Keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah memprioritaskan intervensi yang relatif lebih murah dan cepat dilaksanakan.

Dari perspektif kelompok sasaran, anak jalanan Restu mengungkapkan bahwa belum ada bantuan yang benar-benar membantu mereka untuk berhenti dari jalan (wawancara, 26 Januari 2026), sementara Bapak Indar Soeharto menilai diperlukan solusi pekerjaan atau modal usaha agar tidak kembali ke jalan (wawancara, 26 Januari 2026). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *action* yang diambil oleh pemerintah dengan kebutuhan riil kelompok sasaran. Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian Wahyudi et al. (2021) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya dan sifat manusia membuat program pembangunan ekonomi

sulit dilaksanakan, serta Warwuru et al. (2023) yang menyatakan bahwa fasilitas rehabilitasi dan rumah singgah yang tidak memadai menjadi hambatan utama.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Policy Implementation Mapping* dalam penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Jambi dengan menggunakan tujuh indikator teori Bryson (2004), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek kepentingan, kebijakan memiliki tingkat urgensi tinggi bagi pemerintah daerah dan DPRD, namun terdapat ketidaksesuaian dengan kepentingan kelompok sasaran yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pada aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan anggaran dan program pemberdayaan produktif yang berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan program. Aspek channel menunjukkan komunikasi lintas instansi formal cukup terstruktur, namun komunikasi dengan kelompok sasaran masih bersifat satu arah dan tidak partisipatif. Aspek kemungkinan partisipasi menunjukkan keterlibatan kelompok sasaran yang sangat terbatas dan lebih bersifat pasif sebagai penerima manfaat. Aspek tingkat pengaruh menunjukkan pola hierarkis dengan DPRD dan Dinas Sosial dominan, sementara kelompok sasaran hampir tidak memiliki ruang pengaruh. Aspek implikasi menghasilkan sistem penanganan terstruktur, namun dampak jangka panjang berupa pengurangan *recidivism* belum tercapai. Aspek *action* masih didominasi kegiatan penertiban jangka pendek, sedangkan program rehabilitasi dan pemberdayaan belum optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Sosial perlu memperkuat orientasi kebijakan dari pendekatan penertiban menuju pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti pengembangan program pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pendampingan sosial berkesinambungan. Kedua, DPRD Kota Jambi diharapkan meningkatkan fungsi pengawasan secara intensif tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada efektivitas implementasi program di lapangan. Ketiga, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Satpol PP, lembaga kesejahteraan sosial, dan stakeholder lainnya agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terpadu. Keempat, perlu dibangun mekanisme partisipasi yang lebih substantif dan dialogis, sehingga kelompok sasaran dapat terlibat aktif dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang implementasi kebijakan atau menggunakan pendekatan teori implementasi lainnya guna memperkaya kajian akademik di bidang kebijakan publik. Penelitian ini memiliki

keterbatasan pada aspek generalisasi mengingat bersifat studi kasus kontekstual di Kota Jambi dengan pendekatan kualitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, para informan, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Artikel ini merupakan bagian dari skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.

DAFTAR REFERENSI

- Alatas, M. H. M. (2024). *Krisis Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Jambi, Tantangan Sosial yang Mendesak*. Jambieskpres Selalu Ada yang Baru.Co.Id.
- Alatas, M. H. M. (2024). Krisis Anak Jalanan dan Pengemis di Kota Jambi, Tantangan Sosial yang Mendesak. *Jambiekspres Selalu Ada yang Baru*. <https://jambiekspres.disway.id/read/685302>
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi. (2022). *Statistik Daerah Kota Jambi*. BPS Kota Jambi.
- Bryson, J. M., & Bryson, J. M. (2004). *Stakeholder Identification and Analysis Techniques*.
- Dinas Sosial Kota Jambi. (2026). *Rencana Strategis Tahun 2024--2026*.
- Djarmiko, A. P., Hariyoko, Y., & Soesiantoro, A. (2023). Implementasi Program Kampung Anak Negeri Kota Surabaya (Studi pada UPTD Kampung Anak Wonorejo). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(5), 1–14.
- Hasanah, B. I. (2020). *Pengawasan Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Jambi*. 2507(February), 1–9.
- Hermawanto, A. A., Dewi, D. A. S., & Noviasari, D. T. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan dalam Mewujudkan Ketertiban Umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja. *Borobudur Law and Society Journal*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.31603/11942>
- Hikmal, M., Malik, I., & Wahid, N. (2024). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Perkotaan. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 122–136. <https://doi.org/10.26618/kjap.v10i2.15458>
- Jambikota.go.id. (2025). *Tertibkan Gepeng dan Anjal, Wali Kota Maulana Harap Masyarakat Salurkan Sedekah dan Infak ke Lembaga Resmi*.
- Kurniawan, A., & Heryani, S. A. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Anak Terlantar Menurut Undang-Undang Dasar 1945 di Dinas Sosial Kota Jambi. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(II).
- Maryatun, Raharjo Tri Santoso, & Taftazani Muhammad Budi. (2022). Upaya Penanganan Permasalahan Gelandangan dan Pengemis. *Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 47–62.

- Meifindo, N. H., & Effendy, M. P. (2025). *Kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Jambi Provinsi Jambi*.
- Melli. (2024). *Gepeng dan Anak Jalanan di Kota Jambi Masih Membandel, Sudah Diamankan Tetap Balik ke Jalanan*. Ampar.Id.
- Oktaviola, D., Anderson, I., & Sariyani, D. (2022). Analisis Pembinaan Moral Anak Jalanan di Kota Jambi. *Civic Education Perspective Journal*, 2(2), 42–54. <https://doi.org/10.22437/cepj.v1i2.18014>
- Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. *Journal of Political Issues*, 2(2), 67–78. <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38>
- Rachmawati, V., Faedlulloh, D., & Faedlulloh, D. (2021). *Journal of Political Issues Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Program Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan*. 2, 67–78.
- Wahyudi, A., Usman, D., & Mone, A. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Pembinaan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4), 1287–1299.
- Warwuru, S., Adam, S., & Saija, R. (2023). Upaya Penanggulangan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Ambon. *Study Review*, 1(1), 332–337.